

PERAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2024 DI KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Mohamad Susilo Haryadi

NPP. 32.0727

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0727@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Mu'tamirudin, S.Ag M.Si,

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): There are security and order problems that occur due to the gap in the number of Satlinmas and TPS during the implementation of the Pilkada in Baamang District. **Purpose:** This study aims to examine the role of Satlinmas in maintaining security and order during the Pilkada in Baamang District, East Kotawaringin Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews with informants from Satlinmas members, the Civil Service Police Unit, the General Election Commission (KPU), and the community, as well as supporting documentation. Data analysis is conducted using Miles and Huberman's interactive model, applying the four role dimensions according to Biddle and Thomas as cited in Sarwono (2015), namely expectations, norms, behavior manifestations, and evaluation/sanctions. **Result:** Based on the analysis of the role of Satlinmas in maintaining security and order during the implementation of the regional elections (Pilkada), using the role dimensions proposed by Thomas and Biddle as cited in Sarwono (2015), the following conclusions can be drawn. In the expectation dimension, it is evident that the public has high expectations regarding the performance of Satlinmas. The norm dimension shows that Satlinmas members are aware of their obligations and understand their respective duties. The behavioral manifestation dimension indicates that the security measures carried out by Satlinmas were implemented effectively and yielded satisfactory results. Lastly, the evaluation and sanction dimension reveals that both the community and leadership gave positive assessments of Satlinmas' performance. **Conclusion:** The main influencing factors are human resources, budgeting, and disaster vulnerability. Efforts to enhance the role focus on inclusive socialization, budget efficiency, expanded cooperation, and training and briefing programs. The main recommendation is the equal distribution and strengthening of Satlinmas capacity in each district

Keywords: Role, Regional Head Election, Security, Public Order, Satlinmas

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Terdapat masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi karena kesenjangan jumlah antara Satlinmas dan TPS pada pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Baamang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan dari Anggota Satlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi Pemilihan Umum, dan masyarakat serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman menggunakan empat dimensi peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yaitu harapan, norma, wujud perilaku, dan evaluasi sanksi. **Hasil/Temuan:** Sesuai dengan analisis yang dilakukan terhadap peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada dengan menggunakan dimensi peran menurut Thomas dan Biddle dalam Sarwono (2015). Pada dimensi harapan menunjukkan harapan masyarakat terhadap kinerja Satlinmas, pada dimensi norma menunjukkan kewajiban dari Satlinmas yang sudah mengetahui tugasnya masing-masing, pada dimensi wujud perilaku menunjukkan hasil akhir pelaksanaan pengamanan Satlinmas yang cukup baik, pada dimensi evaluasi sanksi menunjukkan penilaian masyarakat dan pimpinan yang baik terhadap kinerja Satlinmas. **Kesimpulan:** Faktor utama yang memengaruhi yakni sumber daya manusia, anggaran, serta kerawanan bencana. Upaya peningkatan peran difokuskan pada penguatan sosialisasi yang inklusif, melakukan efisiensi anggaran, perluasan kerja sama, serta melakukan pelatihan dan pembekalan. Rekomendasi utama ialah pemerataan peran penguatan kapasitas Satlinmas di tiap Kecamatan.

Kata kunci: Peran, Pilkada, Keamanan, Ketertiban, Satlinmas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu menurut Sugitanata & Majid (2021:3) merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan di Indonesia sebagai ajang kesempatan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin baik di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin terbaik sekaligus sebagai pengejawantahan dari sebuah negara demokrasi (Sutopo, Basri, & Rosyidi, 2024). Pelaksanaan pemilu termasuk dengan Pilkada yang didasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya disebutkan bahwa prinsip pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Pemilihan kepala daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, merupakan sarana penting untuk memilih eksekutif lokal seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan ini bukan sekadar mengisi jabatan, melainkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di semua tingkat pemerintahan (Mirzana, Anas, & Rohman, 2024).

Sedangkan menurut (Rannie, Saraswati, & Wisnaeni, 2023) Pemilihan kepala daerah merupakan momen bagi masyarakat di suatu daerah yang memiliki hak pilih untuk secara demokratis menentukan pemimpin lokal mereka.

Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah, memiliki potensi kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada. Khususnya Kecamatan Baamang yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk mencapai 72.619 jiwa serta persebaran penduduk terbesar berada di Kelurahan Baamang Tengah dengan jumlah penduduk 30.642 jiwa yang menjadikan 59% penduduk kecamatan Baamang berada di Kelurahan Baamang Tengah. Untuk etnis yang tinggal di Kecamatan Baamang sendiri terdisi dari berbagai ragam etnis yang menjadikan Kecamatan Baamang juga menjadi titik rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada.

Satlinmas memainkan peran penting dalam masyarakat, bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kurhayadi, 2024). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta keselamatan selama Pilkada. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu faktor pendukung berjalannya proses pembangunan nasional (Supriatna, 2020). Sedangkan adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan (Suhendi, 2019). Keselamatan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang terlindungi dari bahaya, risiko, atau cedera (Raheemy, Sherratt, & Hallowell, 2025). Sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2017, Permendagri No. 26 Tahun 2020, dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022. Namun, terjadi kesenjangan antara jumlah personel Satlinmas yang tersedia (34 orang) dan jumlah TPS (92 titik) di Kecamatan Baamang, yang berpotensi mengganggu efektivitas pengamanan. Satlinmas juga berpengaruh dalam pelaksanaan kampanye, Kampanye bertujuan untuk memengaruhi pemilih agar terjadi perubahan sikap dan tindakan terhadap pilihan politik mereka (Wiredarme & Muttaqin, 2022).

Data kerawanan TPS yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam rangka persiapan Pilkada menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki riwayat terjadinya kekerasan di TPS selama pelaksanaan Pilkada sehingga memperkuat alasan bagi penulis untuk meneliti bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh Satlinmas Kecamatan Baamang sebagai daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan penulis dalam mengangkat judul penelitian ini melihat relevansi jumlah Satlinmas dan jumlah TPS di Kecamatan Baamang terhadap peran yang dilakukan Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada serta untuk mengetahui bagaimana peran yang dilaksanakan oleh Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang. Peran adalah seperangkat pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan posisi dan statusnya (Rukmana, 2019). Penulis juga beranggapan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengukur efektivitas dari peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pemilu,

mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja, serta untuk mendukung sistem demokrasi yang sehat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pengembangan serta kinerja Satlinmas utamanya dalam kegiatan trantibum. Belum banyak kajian yang mengevaluasi peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan dimensi peran seperti yang dikemukakan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terkait peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pilkada secara lebih mendalam. Peran adalah seperangkat pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan posisi dan statusnya (Rukmana, 2020)

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Fransiska Dian Mayasari (2024), menjelaskan pengembangan kapasitas anggota satuan polisi pamong praja Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan dan pengalaman setiap anggota Satlinmas. Sementara itu, Didi Setio Nugroho (2022), menganalisis kontribusi dari Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi Satlinmas di Kabupaten Sleman melalui kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini. Penelitian Muhamad Abas (2021), menyatakan peningkatan peran Satlinmas dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan pilkada sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian Harsoyo (2021), menganalisis kapasitas pembangunan organisasi dengan mengidentifikasi kondisi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Semarang, termasuk motivasi, kapasitas institusi, pemahaman anggota tentang tugas dan fungsi utama. Penelitian Santari, Ignasius Hendrasmo, Muhammad Abduh (2024), menyoroti Implementasi kebijakan terkait Linmas, kualitas sumber daya manusia anggota Linmas, partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Linmas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satlinmas. Seluruh penelitian tersebut menjadi rujukan penting bagi penulis dalam melihat peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaingin Timur.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian Fransiska Dian Mayasari (2024) dan Harsoyo (2021) yang membahas pengembangan Satlinmas dengan menggunakan teori capacity building sedangkan pada penelitian ini penulis membahas peran dari Satlinmas dalam pengamanan Pilkada dengan menggunakan teori peran oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015). Pada penelitian Didi Setio Nugroho (2022) yang membahas kontribusi Satlinmas dalam keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman sedangkan pada penelitian penulis membahas peran dari Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang, Muhamad Abas (2021), maupun Santari, Ignasius Hendrasmo, Muhammad Abduh

(2024) yang meneliti kinerja Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara umum sedangkan pada penelitian ini penulis melihat bagaimana peran dari Satlinmas dalam keamanan dan ketertiban dalam konteks yang lebih khusus yaitu pada pelaksanaan Pilkada. Kebaruan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan yang menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yaitu dimensi harapan, norma, wujud perilaku, serta evaluasi sanksi. Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki kekhususan karena berfokus pada peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pilkada, yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya serta lokus dari penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kecamatan Baamang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap implementasi peran yang diberikan Satlinmas di dalam pelaksanaan Pilkada.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran, faktor penghambat dan upaya dalam pengamanan Pilkada oleh Satlinmas di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini penulis ambil karena menurut penulis informan tersebut dapat memberikan gambaran serta pemahaman yang dalam terhadap peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan memilih informan yang memahami topik penelitian. Dalam penelitian ini informan terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (KPU), Camat Baamang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Baamang, Anggota Satlinmas, dan masyarakat. Pendekatan wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari tanggal 6 – 24 Januari 2025 dan untuk lokus penelitian dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Kantor Kecamatan Baamang, serta turun ke masyarakat. Analisis data dilakukan berdasarkan teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang meliputi harapan, norma, wujud perilaku, dan evaluasi sanksi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Harapan

Harapan merupakan bagian penting dalam teori peran yang menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap individu atau kelompok dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, harapan yang dimaksud adalah ekspektasi masyarakat terhadap peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Harapan ini menjadi cerminan dari bagaimana masyarakat menilai dan menginginkan kinerja Satlinmas untuk semakin baik di masa mendatang.

Masyarakat umum di Kecamatan Baamang memberikan berbagai harapan terhadap kinerja Satlinmas. Misalnya, Bapak Ahmad Junaidi dari Kelurahan Baamang Hilir menyampaikan harapannya agar generasi muda lebih aktif dalam kegiatan Satlinmas yang selama ini didominasi oleh anggota yang sudah berumur. Sementara itu, Bapak Wardi, Ketua RT 12 di kelurahan yang sama, berharap agar keaktifan Satlinmas tidak hanya muncul menjelang Pemilu, tetapi juga hadir secara berkelanjutan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Di Kelurahan Baamang Tengah, warga seperti Ibu Muslifah menilai Satlinmas sudah bekerja dengan baik namun berharap agar peran mereka lebih berdampak dalam menjaga ketertiban. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Nur Sutikno yang berharap Satlinmas mampu menjaga kondisi kondusif di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama Pilkada berlangsung. Kemudian di Desa Tinduk, Bapak Rizal Herianur selaku Ketua RT 02 mengungkapkan harapan terkait penyediaan seragam dan perlengkapan, karena dalam Pilkada sebelumnya Satlinmas hanya menggunakan pakaian sehari-hari.

Selain masyarakat umum, harapan juga datang dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diwakili oleh Bapak Wendy, menyampaikan harapannya agar Satlinmas mampu mendorong partisipasi masyarakat menjadi petugas Linmas TPS. Hal ini penting mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia, sehingga keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pengamanan di TPS.

Bapak Arson sebagai pihak dari Satpol PP menambahkan bahwa Satlinmas di Kecamatan Baamang lebih difokuskan pada pengamanan strategis seperti pengawalan kotak suara. Oleh karena itu, keberadaan Linmas TPS sangat dibutuhkan untuk memastikan ketertiban selama proses pemungutan suara. Harapan ini memperjelas bahwa penguatan kapasitas teknis melalui perekrutan Linmas TPS merupakan langkah taktis yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan demokrasi.

Camat Baamang, Bapak Sufiansyah, turut menyuarakan harapannya dengan menekankan perlunya penambahan personel Satlinmas serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Kebutuhan ini dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan secara optimal, terutama dalam menghadapi agenda besar seperti Pilkada yang membutuhkan kesiapan sumber daya secara maksimal.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Baamang, Bapak Abdussyukur, juga menyoroti persepsi masyarakat bahwa Satlinmas hanya aktif pada momen tertentu. Harapan beliau adalah agar Satlinmas dapat lebih berperan dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat sehingga keberadaannya lebih dirasakan dan diakui. Dengan keterlibatan

yang lebih rutin, maka kepercayaan masyarakat terhadap Satlinmas juga akan semakin meningkat.

Harapan strategis juga disampaikan oleh Bapak Arson, S.H., M.Si., selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Ia menegaskan pentingnya penambahan jumlah anggota Satlinmas dari lima menjadi sepuluh orang per TPS. Penambahan ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan selama Pilkada dan juga dalam kegiatan masyarakat secara umum.

Pernyataan dan harapan dari berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Harapan-harapan tersebut tidak hanya menyoroti aspek teknis seperti jumlah personel atau kelengkapan seragam, tetapi juga menyentuh dimensi partisipatif dan keberlanjutan peran Satlinmas di tengah masyarakat.

Dengan memperhatikan harapan dari masyarakat umum, kelompok strategis, hingga pejabat yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan Satlinmas, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan hal-hal mendesak yang perlu dilakukan. Harapan-harapan ini menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan yang lebih responsif untuk meningkatkan peran dan kontribusi Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pilkada.

3.2. Norma

Norma dalam konteks sosial seringkali dipahami sebagai aturan atau pedoman yang menjadi harapan bagi individu saat menjalankan peran sosial tertentu. Dalam penelitian ini, dimensi norma digunakan untuk melihat kesiapan Satlinmas dalam menjaga keamanan, khususnya selama pelaksanaan Pilkada. Norma berkaitan erat dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dari peran yang dimiliki serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, norma menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan dan kesadaran Satlinmas terhadap perannya.

Dimensi norma dalam penelitian ini dibagi menjadi dua indikator utama, yaitu harapan anticipatory dan harapan normatif. Harapan anticipatory merupakan bentuk harapan terhadap kemungkinan yang bisa terjadi, yang menuntut kesiapan dan langkah antisipatif dari individu yang menjalankan peran sosial. Dalam konteks Satlinmas, indikator ini mencerminkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai kemungkinan selama pelaksanaan Pilkada, termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Penulis melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam terkait indikator harapan anticipatory. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat di Kantor Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Baamang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembekalan telah diberikan kepada Satlinmas sebagai bentuk persiapan menghadapi Pilkada. Pembekalan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas serta kemampuan menghadapi situasi yang tidak terduga.

Bapak Arson, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa Satpol PP telah melakukan pembekalan khusus untuk meningkatkan kemampuan antisipasi Satlinmas dalam menghadapi Pilkada. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat perhatian serius dari pihak berwenang dalam mempersiapkan Satlinmas. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdussyukur yang menegaskan bahwa Satlinmas di Kecamatan Baamang telah mendapatkan pembekalan dan selalu diimbau untuk siaga dalam menjaga ketertiban.

Berdasarkan pernyataan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satlinmas menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi potensi permasalahan selama Pilkada. Program pelatihan dan pembekalan yang dilakukan menjadi strategi preventif yang efektif, sehingga setiap anggota Satlinmas diharapkan mampu menjalankan tugas pengamanan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan Satlinmas bukan hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi juga kesiapan mental dan teknis.

Pelatihan dan pembekalan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan Satlinmas. Tugas ini merupakan bagian dari peran Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memberikan surat tugas resmi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, sebagai bukti konkret dari kesiapan dan keseriusan pelaksanaan program pelatihan.

Sementara itu, indikator harapan normatif merujuk pada bentuk harapan yang mencerminkan kewajiban yang melekat pada suatu peran. Dalam konteks Satlinmas, harapan normatif mencerminkan kesadaran anggota terhadap kewajiban mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi menjadi kunci agar mereka dapat menjalankan peran secara maksimal.

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Arson menegaskan bahwa pemahaman anggota Satlinmas terhadap tupoksi dan kewajiban mereka sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembekalan yang diberikan sebelum pelaksanaan Pilkada berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Satlinmas dalam menjalankan peran mereka secara profesional. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Abdussyukur yang menyampaikan bahwa anggota Satlinmas di Kecamatan Baamang menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk menjaga kotak suara selama semalam.

Kesimpulan dari temuan ini adalah bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Satlinmas, yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pembekalan teknis, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapan dan kesadaran normatif anggota Satlinmas. Dengan adanya pembinaan yang terstruktur, Satlinmas mampu menjalankan kewajiban dengan lebih baik, sehingga turut berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang aman dan tertib selama Pilkada.

3.3. Wujud Perilaku

Dalam teori peran, wujud perilaku sering dikaitkan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu saat menjalankan perannya dalam konteks sosial tertentu. Perilaku ini dipengaruhi oleh harapan sosial, interaksi dengan orang lain, dan pertimbangan rasional. Wujud perilaku dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, dan hasil akhir yang diperoleh. Dalam konteks Satlinmas, ketiga aspek ini menggambarkan bagaimana peran mereka diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pengamanan selama Pilkada.

Tujuan adalah orientasi hasil yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok dalam menjalankan perannya. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat di Kantor Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Arson, SH., M.Si., dijelaskan bahwa tujuan Satlinmas dalam Pilkada adalah untuk menjaga keamanan di sekitar TPS agar pelaksanaan pemilu berjalan kondusif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Baamang, Bapak Abdussyukur, yang menyatakan bahwa tujuan Satlinmas adalah memastikan ketertiban TPS dan menjaga kotak suara agar proses Pilkada berjalan baik.

Dari penjelasan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Satlinmas dalam pengamanan Pilkada adalah menjaga ketertiban di TPS dan memastikan keamanan kotak suara. Tujuan ini sejalan dengan harapan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tujuan tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan 2024 dari Satpol PP dan Kecamatan Baamang, yang berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan keamanan di lingkungan masyarakat.

Strategi adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam wawancara, Bapak Arson menjelaskan bahwa strategi pengamanan dimulai dengan distribusi logistik dua hari sebelum Pilkada dan penempatan personel Satlinmas di TPS pada hari-H. Strategi ini dinilai sesuai dengan norma masyarakat dan telah memenuhi aspek efektivitas karena mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan sejak dini.

Bapak Abdussyukur menambahkan bahwa pihak kecamatan juga memberikan himbauan kepada Satlinmas agar selalu siaga menghadapi potensi gangguan. Menurutnya, semua arahan yang diberikan sesuai dengan norma yang berlaku dan terbukti efektif karena pelaksanaan Pilkada tidak mengalami keterlambatan. Ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bersifat preventif dan mampu mendukung kelancaran proses pemilihan.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa strategi pengamanan oleh Satlinmas melibatkan koordinasi aktif antara Satpol PP dan kecamatan. Pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi antar lembaga di tingkat lokal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif selama Pilkada. Peran aktif pihak kecamatan menjadi pelengkap penting dalam mendukung efektivitas pengamanan yang dilakukan oleh Satlinmas.

Hasil akhir dari peran yang dijalankan oleh Satlinmas dapat dilihat dari kelancaran pelaksanaan Pilkada dan kepuasan masyarakat. Bapak Arson menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan tertib dan potensi gangguan dapat diatasi dengan baik oleh Satlinmas. Hal ini menandakan bahwa hasil akhir yang diharapkan telah tercapai secara optimal.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Abdussyukur yang menyatakan tidak ada laporan gangguan dari TPS selama Pilkada berlangsung di Kecamatan Baamang. Ini membuktikan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Satlinmas berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini juga tercermin dalam Rencana Kerja Tahunan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, yang menargetkan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Capaian Satlinmas dalam pengamanan Pilkada menjadi wujud konkret pencapaian target strategis kelembagaan dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat.

Efektivitas pengamanan juga terbukti secara kuantitatif melalui data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang mencatat capaian indikator meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib mencapai 101%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja

pengamanan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, menandakan keberhasilan kerja Satlinmas dan instansi pendukungnya.

Selain indikator kelembagaan, tingkat kepuasan masyarakat juga menjadi bukti nyata keberhasilan peran Satlinmas. Hasil wawancara dengan lima warga dari Kelurahan Baamang Hilir, Baamang Tengah, dan Desa Tinduk menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan pengamanan selama Pilkada. Mereka mengapresiasi kehadiran Satlinmas yang memberikan rasa aman di lingkungan TPS.

Secara keseluruhan, data dan temuan dari wawancara serta dokumen pendukung menunjukkan bahwa peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang berjalan efektif dan mampu menjawab harapan masyarakat. Kolaborasi antara Satpol PP, kecamatan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan ini, serta mencerminkan keberhasilan penerapan peran sosial yang profesional dan bertanggung jawab.

3.4. Evaluasi dan Sanksi

Evaluasi dan sanksi merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas peran seseorang atau suatu kelompok dalam menjalankan tugas, khususnya dalam konteks peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada. Dimensi ini mencakup penilaian internal dan eksternal terhadap kinerja, serta bagaimana tanggapan atau konsekuensi diberikan atas perilaku yang ditampilkan, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi. Evaluasi dan sanksi menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar terhadap kinerja Satlinmas dalam menjalankan tugasnya selama pengamanan Pilkada. Penilaian ini sangat penting karena memberikan perspektif objektif berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan selama proses pengamanan. Evaluasi dari pihak eksternal seperti KPU, Camat, dan masyarakat memberikan gambaran bagaimana peran Satlinmas dirasakan secara nyata oleh lingkungan di sekitarnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Wendy, S.Sos.H selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU, beliau menyampaikan bahwa kinerja Satlinmas dinilai baik karena tidak ada laporan gangguan dan anggota Satlinmas melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan apresiasi terhadap kinerja mereka dalam menciptakan suasana aman selama Pilkada berlangsung. Penilaian positif juga diberikan oleh Bapak Sufiansyah, S.E. selaku Camat Baamang yang menyatakan bahwa kinerja pengamanan sudah cukup baik dan terlaksana secara maksimal. Evaluasi dari pemangku kepentingan tingkat kecamatan ini memperkuat pandangan bahwa peran Satlinmas telah berjalan sesuai harapan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran Pilkada. Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan hal yang serupa. Masyarakat merasa aman dan nyaman selama proses pemungutan suara karena kehadiran Satlinmas yang dianggap mampu menjaga ketertiban di lingkungan TPS. Penilaian ini penting karena menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap peran Satlinmas sebagai pelindung masyarakat dalam konteks demokrasi lokal.

Sementara itu, evaluasi internal mencerminkan penilaian dari dalam organisasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi ini penting untuk menilai secara reflektif terhadap

kekuatan dan kelemahan internal yang mungkin tidak terlihat oleh pihak luar. Dalam konteks Satlinmas, evaluasi internal dilakukan oleh pejabat struktural yang berwenang di Satpol PP.

Menurut Ibu Widya Yulianti, S.H., M.M. selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, kinerja Satlinmas selama Pilkada sudah baik dan kondisi di lapangan juga kondusif tanpa adanya laporan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi internal, peran dan fungsi Satlinmas berjalan efektif dan sesuai dengan harapan organisasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arson, SH., M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Ia menyampaikan bahwa tidak ada laporan gangguan keamanan yang sampai kepada dirinya, yang berarti bahwa tugas pengamanan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah serius. Ini menunjukkan adanya sistem kerja yang solid di antara anggota Satlinmas.

Capaian kinerja ini juga diperkuat oleh data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang menyebutkan bahwa capaian pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan mencapai angka 115%. Ini menjadi bukti kuantitatif bahwa peran Satlinmas tidak hanya berjalan baik secara subjektif, tetapi juga terbukti secara administratif.

Berkenaan dengan sanksi, dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arson dan Bapak Abdussyukur, keduanya menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota Satlinmas selama pengamanan Pilkada. Hal ini disebabkan karena peran Satlinmas bersifat sukarela dan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satlinmas selama menjalankan tugas juga menjadi faktor tidak diberlakukannya sanksi. Mereka sudah diberikan pembekalan yang cukup sehingga memahami batasan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selama pengamanan berlangsung.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi evaluasi dan sanksi dalam peran Satlinmas menunjukkan hasil yang positif. Baik dari segi evaluasi internal maupun eksternal, Satlinmas dianggap telah menjalankan tugas pengamanan Pilkada secara maksimal, tanpa adanya laporan pelanggaran ataupun gangguan serius di lapangan. Tidak adanya sanksi juga menjadi indikator bahwa kinerja mereka telah sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran Satlinmas menjadi komponen vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung, terutama karena posisi mereka yang dekat dengan masyarakat secara sosial maupun geografis. Satlinmas merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dan secara langsung berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih tajam tentang kondisi sosial, potensi konflik, serta dinamika politik lokal.

Temuan ini memperkuat pandangan dari Muhamad Abas (2021) yang menyatakan bahwa Satlinmas memegang peran strategis dalam pencegahan kriminalitas serta pengamanan saat Pilkada berlangsung. Hal ini karena mereka mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini melalui interaksi sosial yang intens dengan masyarakat. Satlinmas tidak

hanya berperan sebagai pelaksana teknis dalam pengamanan, namun juga sebagai agen sosial yang memiliki kemampuan untuk meredam ketegangan dan memfasilitasi komunikasi antara warga dan penyelenggara pemilu.

Namun demikian, efektivitas peran Satlinmas dalam Pilkada belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menemukan adanya beberapa hambatan utama, yakni keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas, minimnya alokasi anggaran yang mendukung kegiatan Satlinmas, serta faktor eksternal seperti potensi kerawanan bencana yang mengganggu proses pelaksanaan pengamanan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun Satlinmas memiliki peran strategis, namun daya dukung kelembagaan mereka belum sepenuhnya memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Santari, Ignasius Hendrasmo, dan Muhammad Abduh (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban belum maksimal akibat hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan kelembagaan. Di antaranya adalah belum adanya regulasi atau kebijakan yang secara jelas mengatur tugas, wewenang, dan pembinaan Satlinmas secara terpadu serta pelatihan yang belum menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan kapasitas, penelitian ini juga memperkuat hasil studi oleh Fransiska Dian Mayasari (2024), yang menyoroti bahwa pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Satlinmas masih menghadapi tantangan serius, terutama karena banyaknya anggota Satlinmas yang berusia lanjut dan latar belakang pendidikan yang beragam, bahkan cenderung rendah. Kondisi ini menghambat adaptasi anggota terhadap pelatihan baru yang menuntut pemahaman atas situasi kompleks dalam pengamanan Pilkada.

Penelitian Hidayat dan Nursyadana (2022) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat proses pengamanan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, penulis juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga seperti BUMDes, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan dan ketertiban selama Pilkada.

Didi Setio Nugroho (2022) dalam penelitiannya juga menekankan pentingnya kegiatan deteksi dini dan cegah dini oleh Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi ini kerap terhambat oleh kurangnya pelatihan dan pembekalan, serta faktor usia anggota yang lebih dari setengahnya telah berusia di atas 50 tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi fisik dan kemampuan mobilitas yang sudah tidak seprima usia produktif.

Jika dibandingkan dengan studi Harsoyo (2021) di Kota Semarang, terlihat bahwa permasalahan Satlinmas bersifat umum dan sistemik. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa peran Satlinmas dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat belum maksimal karena kelemahan dari sisi individu, kelembagaan, maupun sistem pendukung. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan, minimnya struktur organisasi yang jelas, serta keterbatasan fasilitas dan koordinasi antarwilayah menjadi hambatan utama.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur yang telah ada dengan memberikan gambaran nyata tentang peran strategis Satlinmas dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun Satlinmas memiliki posisi strategis di masyarakat dan mendapatkan penilaian positif dari berbagai pihak, namun penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi syarat utama agar peran tersebut bisa dijalankan secara lebih maksimal.

Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk regulasi yang mendukung, penguatan anggaran, serta pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas. Tanpa hal tersebut,

keberhasilan pengamanan Pilkada akan sangat bergantung pada semangat pengabdian para anggota Satlinmas, bukan pada sistem yang kokoh dan terstruktur.

Ke depan, pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, seperti tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta lokal juga menjadi penting dalam mendukung peran Satlinmas. Dukungan dari berbagai lini akan memperkuat posisi Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak hanya dalam konteks Pilkada tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan pemetaan masalah, namun juga membuka ruang diskusi mengenai arah pengembangan Satlinmas yang lebih modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan penguatan tersebut, Satlinmas akan mampu menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik lokal yang demokratis dan aman.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan tiga faktor utama yang memengaruhi peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada, yaitu sumber daya manusia (SDM), Keterbatasan Anggaran, serta kerawanan bencana. Hambatan muncul dari keterbatasan SDM dalam edukasi dan pelayanan, tantangan keandalan sistem dan keamanan digital, lemahnya koordinasi kepemimpinan, serta kebiasaan masyarakat yang masih dominan menggunakan metode konvensional.

Upaya difokuskan pada penguatan sosialisasi yang inklusif, edukasi tentang keamanan dan keabsahan bukti digital, perluasan kerja sama dengan BUMDes dan komunitas lokal, peningkatan keamanan dan pengembangan fitur aplikasi, serta mempererat koordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi tindak lanjut evaluasi program.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena pada pelaksanaannya kesenjangan jumlah Satlinmas dan TPS dapat di cover dengan baik oleh Linmas TPS yang diadakan oleh KPU. Secara umum, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satlinmas dinilai baik, terutama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kedekatan anggota Satlinmas dengan masyarakat setempat, yang menjadikan mereka mampu memahami kondisi sosial secara lebih menyeluruh dan responsif terhadap potensi gangguan keamanan. Dari dimensi harapan, ditemukan bahwa terdapat ekspektasi yang cukup besar baik dari masyarakat maupun dari pihak penyelenggara Pilkada terhadap peningkatan kualitas kinerja Satlinmas. Harapan tersebut mencakup perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang tugas lapangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan yang rutin, serta optimalisasi efektivitas kerja yang didukung oleh manajemen yang lebih profesional. Aspirasi ini menjadi refleksi bahwa keberadaan Satlinmas dipandang penting, namun masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek strategis. Pada dimensi norma, penelitian menunjukkan bahwa anggota Satlinmas telah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mereka memiliki pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi

kedisiplinan dalam bertugas. Tidak ditemukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku selama proses pengamanan Pilkada berlangsung, baik norma organisasi maupun norma sosial di masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa integritas dan komitmen anggota Satlinmas cukup tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Sementara itu, pada dimensi wujud perilaku, pengamanan yang dilakukan oleh Satlinmas berjalan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tidak hanya menciptakan suasana yang tertib dan aman, namun juga menumbuhkan rasa nyaman bagi warga yang ikut serta dalam proses demokrasi. Kinerja ini mendapatkan apresiasi karena selama pelaksanaan Pilkada, tidak tercatat adanya gangguan keamanan atau konflik yang berarti, baik di TPS maupun di lingkungan sekitar. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan preventif yang dilakukan oleh Satlinmas. Evaluasi internal maupun eksternal terhadap peran Satlinmas juga menunjukkan hasil yang positif. Penilaian dari pimpinan, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, menunjukkan bahwa kinerja Satlinmas sudah berada pada jalur yang tepat. Dari sisi eksternal, tanggapan masyarakat, perangkat kecamatan, serta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa kehadiran Satlinmas sangat membantu dalam menciptakan suasana kondusif selama Pilkada. Sinergi yang baik antara Satlinmas dan elemen masyarakat lainnya menjadi faktor penting dalam pencapaian hasil ini. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi Satlinmas, khususnya dalam dimensi strategi pelaksanaan tugas. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan personel yang aktif dan siap bertugas, terutama mengingat banyak anggota yang telah lanjut usia. Di samping itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelatihan rutin. Tidak hanya itu, potensi bencana sosial, seperti konflik horizontal yang dapat muncul dari ketegangan antar pendukung calon, menjadi ancaman tersendiri dalam pengamanan Pilkada. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dilakukan sejumlah langkah strategis oleh pihak terkait. Pertama, melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk menjaring calon anggota Satlinmas baru dari kalangan masyarakat yang masih produktif, demi mengimbangi keterbatasan personel yang ada. Kedua, manajemen anggaran dilakukan dengan cermat melalui strategi penghematan dan pembagian anggaran yang efisien agar seluruh kebutuhan dasar operasional tetap terpenuhi. Selain itu, pendekatan sosial kultural juga dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah gesekan antarwarga, serta membangun kepercayaan kolektif terhadap proses demokrasi. Kehadiran para tokoh lokal ini terbukti mampu meredam potensi konflik dan memberikan legitimasi terhadap peran yang dijalankan oleh Satlinmas, karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas masing-masing. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengamanan Pilkada dapat terus berjalan secara efektif, profesional, dan kondusif. Ke depan, dibutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait agar Satlinmas bisa menjadi institusi yang lebih tangguh dan adaptif. Penguatan regulasi, peningkatan anggaran, serta pembinaan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan masyarakat. Dengan penguatan pada semua dimensi harapan, norma, wujud perilaku, serta evaluasi dan sanksi diharapkan Satlinmas

dapat menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban umum, tidak hanya pada saat Pilkada, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kinerja positif yang telah ditunjukkan selama pengamanan Pilkada di Kecamatan Baamang menjadi fondasi kuat untuk membangun sistem keamanan lokal yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari masyarakat, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satlinmas dalam pengamanan Pilkada terutama di wilayah Kalimantan Tengah pada umumnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kurhayadi. (2024). Enhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*.
<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4995>
- Mirzana, H. A., Anas, A. A., & Rohman, A. D. (2024). CURRENT REGULATIONS AND ANTICIPATIONS ON CRIMINALIZING BLACK CAMPAIGNS FOR THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS. *Diponegoro Law Review*.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.9.2.2024.258-276>
- Raheemy, Y., Sherratt, F., & Hallowell, M. R. (2025). What is safety? contemporary definitions and interpretations across. *journal homepage*.
www.elsevier.com/locate/safety.
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2023). The Phenomenon of Political Dynasty in Regional Head Elections in Indonesia. *JURNAL KAJIAN SYARI'AH DAN MASYARAKAT*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16477>
- Rukmana, M. G. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG. *JURNAL KONSTITUEN*.
- Rukmana, M. G. (2020). EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Tatapamong*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1234>
- Suhendi, D. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. *Jurnal Tatapamong*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145>

- Supriatna, D. (2020). SINERGISITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. *JURNAL KONSTITUEN*.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2341/1142>
- Sutopo, U., Basri, A. H., & Rosyidi, H. (2024). PRESIDENTIAL THRESHOLD IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTIONS: IMPLICATIONS FOR THE BENEFITS OF DEMOCRACY IN INDONESIA. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>
- Wiredarme, & Muttaqin, M. Z. (2022). CHALLENGES AND STRATEGIES TO MINIMIZE CAMPAIGN VIOLATIONS OF REGIONAL HEAD ELECTION. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n1-5>
- Abas, M., & Yanuarinta, H. F. (2021). PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALITAS DAN PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2020 DI DESA SUKAKERTA KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG. *journal.ubpkarawang.ac.id*.
<http://repository.radenintan.ac.id/23686/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>
- Harsoyo. (2021). The Role of SATLINMAS in Actualizing Public Safety and Order. *Forum Ilmu Sosial*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/30792>
- Mayasari, F. D., & Chasanah, U. (2024). UPAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG . *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*.
<https://jurnal.stiwww.ac.id/index.php/jrima/article/view/874>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
<https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/18>
- Nugroho, D. S., & Supradal. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*.
<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/262>
- Santari, I. H., & Abduh, M. (2024). Evaluasi Peningkatan Peran Anggota Linmas Kelurahan Muntang Tampus Kecamatan Prabumulih Barat. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1519>

